

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Pada bagian ini penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan pertanyaan rumusan masalah yang telah dipertanyakan oleh peneliti. Peneliti menyimpulkan terdapat beberapa penemuan penting tentang proses implementasi kebijakan pro UMKM dalam mewujudkan pembangunan ekonomi rakyat, yaitu:

a. Kepatuhan

1. Pemahaman

Secara keseluruhan aktor yang terlibat mengetahui dan memahami tentang tugasnya dan isi dari kebijakan. Pemahaman tersebut diperoleh melalui sosialisasi dan pelatihan tugas masing-masing dan tujuan dari kebijakan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Menurut model implementasi Ripley dan Franklin dapat diketahui bahwa petunjuk program telah mengatur sedemikian rupa mengenai tugas dan fungsi dari implementor yang satu dan yang lainnya, sehingga implementor dapat bekerja sesuai dengan lingkup masing-masing sehingga tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan. Namun terdapat kendala mengenai pemahaman pelaku usaha yang berdampak pada kualitas dan kuantitas produk yang dihasilkan.

2. Perilaku Aktor Menjalankan Perintah dari Atasan

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebagai pemerintah telah menjalankan tugasnya dalam implementasi kebijakan melalui program Bela-Beli Kulon Progo sebagai pemberi perlindungan serta memberikan pembinaan dan melakukan pengawasan, selain itu pihak Koperasi juga menjalankan tugasnya dalam manajemen produk lokal untuk dipasarkan di Tomira. Tidak hanya itu, pelaku usaha juga menjalankan perannya dengan menciptakan produk untuk dipasarkan di Tomira sebagai bentuk

pemberdayaan dan sasaran kebijakan. Dapat disimpulkan bahwa perilaku dari seluruh aktor yang terlibat sudah cukup baik karena tugas yang menjadi tanggung jawab masing-masing implementator dapat terlaksana.

b. What's Happening (Apa Yang Terjadi)

1. Banyaknya Aktor Yang Terlibat (*The Profusion of Actors*)

Aktor dan implementator yang terlibat dalam pelaksanaan program Bela-Beli Kulon Progo memiliki kualitas yang terlatih dengan baik yang dilakukan melalui sosialisasi dan pelatihan, namun terdapat kendala yang terjadi karena kurangnya kualitas sumber daya manusia pada pihak pelaku usaha, sehingga menghambat pelaksanaan kebijakan dengan belum terpenuhinya presentase minimal 20% produk UMKM di Tomira karena keterbatasan produksi produk yang lolos untuk dipasarkan.

2. Kejelasan Tujuan (*The Multiplicity and Vagueness of Goals*)

Kejelasan tujuan pada implementasi program Bela-Beli Kulon Progo dinilai berdasarkan pengetahuan implementor terhadap program Bela-Beli Kulon Progo dan sudah cukup baik. Pengetahuan yang didapatkan oleh seluruh implementator diperoleh dari adanya sosialisasi dan pelatihan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah. Dengan kejelasan tujuan dari kebijakan yang dimengerti oleh implementator, memberikan dampak yang baik pada kemudahan implementasi karena implementor mudah memahami dan menerjemahkan dalam tindakan nyata pada program ini.

3. Perkembangan dan Kompleksitas Program Pemerintah (*The Proliferation and Complexity of Government Programs*)

kompleksitas dalam pelaksanaan program Bela-Beli Kulon Progo sudah sangat kompleks, karena adanya dukungan dan petunjuk pelaksanaan program yang jelas dan dipahami seluruh aktor melalui proses sosialisasi. Dengan adanya petunjuk pelaksanaan yang jelas dan dipahami seluruh aktor memberikan dampak pada kelancaran proses implementasi.

4. Partisipasi pada Semua Unit Pemerintahan (*The Participation of Governmental Units at All Territorial Levels*).

Partisipasi pada semua unit pemerintah pada pelaksanaan program Bela-Beli Kulon Progi sudah baik yang diwujudkan dengan keterlibatan dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabuapten Kulon Progo, dengan adanya keterlibatan dan perlindungan dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah pada seluruh aktor yang terlibat menunjukkan adanya bentuk partisipasi yang diberikan oleh pemerintah terhadap pelaksanaan Program Bela-Beli di Kulon Progo.

5. Faktor-Faktor Penghambat Yang Mempengaruhi Implementasi (*The Uncontrollable Factors That All Affect Implementation*)

Pada proses implementasi masih ada beberapa hambatan yang menjadi kendala. Salah satu hambatannya yaitu dipengaruhi oleh faktor internal terutama sumber daya manusianya, yaitu produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha belum seluruhnya mampu lolos kurasi untuk dapat dipasarkan di Tomira dan lolos untuk untuk mendapatkan barcode. Jadi walaupun sistem dan kualitas yang ditetapkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sudah baik, harus diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia yang mampu mengikutinya dengan menciptakan produk lokal yang mampu lolos untuk dipasarkan di Tomira.

5.2 Saran

Pada penulisan ini proses implementasi kebijakan yang dilakukan sudah cukup baik. Akan tetapi masih ada beberapa kendala dan juga hambatan dalam proses implementasi sehingga ada beberapa rekomendasi ataupun saran yang disampaikan guna menjadi masukan dan juga sebagai sarana evaluasi untuk mencapai implementasi yang efektif yaitu sebagai berikut:

- a. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah diharapkan dapat memberikan perhatian lebih terhadap pelaku usaha melalui sosialisasi maupun pelatihan bagi Sumber Daya Manusia (SDM) terkait pengelolaan produk lokal yang baik, terutama pada proses menciptakan produk yang dapat lolos kurasi dan sistem barcode. Karena hal tersebut merupakan salah satu kendala dalam proses implementasi kebijakan pro UMKM melalui Program Bela-Beli Kulon Progo.
- b. Pihak Dinas diharapkan memberikan sosialisasi dan pengarahan pada penggunaan sistem *barcode* yang matang kedalam setiap aktivitas yang harus dilewati oleh pelaku usaha. Hal ini akan menciptakan kesiapan dari seluruh pihak dalam menjalankan tugas dan perannya sehingga aktivitas yang dijalankan dapat terstruktur dan terarah dengan baik.
- c. Pihak pelaku usaha diharapkan lebih aktif dalam memperjuangkan produknya untuk dapat lolos kurasi dan mendapatkan *barcode* untuk dipasarkan ke Tomira supaya menciptakan ketersediaan produk yang memenuhi presentase minimal 20% dari seluruh produk di toko.
- d. Rekomendasi terakhir yaitu bagi peneliti berikutnya yang akan melakukan penelitian terkait implementasi kebijakan pro UMKM dalam mewujudkan pembangunan ekonomi rakyat di Kabupaten Kulon Progo, disarankan agar dapat menyempurnakan penelitiannya dengan data yang lebih lengkap dan mendalam sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik lagi, dengan mengusut seluruh aktor dan implementator yang berperan penting dalam

pelaksanaan implementasi. Karena pada penelitian ini penulis hanya mengambil sebagian kecil aktor atau implementator yang paling mendasar dan paling berperan dalam proses implementasi kebijakan pro UMKM di Kabupaten Kulon Progo.

